

KATALOG : 4102002.2172

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

KOTA TANJUNGPINANG 2020



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANJUNGPINANG

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

KOTA TANJUNGPINANG 2020



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER KOTA TANJUNGPINANG 2020

ISBN :

No. Publikasi : 21720.2106

Katalog BPS : 4102002.2172

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman : xiv + 83

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang

Dicetak oleh :

CV. Rizky Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum:
Mangamputua

Penyunting:
Mangamputua

Penulis:
Dian Fitriana Arthati
Dewi Sartika Sari

Pengolah Data :
Dian Fitriana Arthati
Dewi Sartika Sari

Gambar Kulit:
Dewi Sartika Sari

Infografis :
Dewi Sartika Sari



KATA PENGANTAR

Penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungpinang 2020 ini merupakan salah satu upaya BPS Kota Tanjungpinang dalam memenuhi keinginan para konsumen data. Publikasi ini menyajikan angka Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungpinang yang diukur dari tiga dimensi, yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM digunakan sebagai dasar evaluasi keberhasilan pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia, utamanya yang berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, dan kondisi ekonomi yang dilihat dari kemampuan daya beli penduduk. IPG digunakan sebagai bahan evaluasi untuk melihat pemerataan pembangunan gender.

Publikasi ini berisi penjelasan beberapa aspek yang berkaitan dengan IPM, IPG dan hasil perhitungan IPM, IPG Kota Tanjungpinang beserta komponennya, sekaligus perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Segala kritik dan saran bagi penyempurnaan selanjutnya sangat diharapkan.

Tanjungpinang, April 2021

Kepala BPS Kota Tanjungpinang



Drs. Mangamputua

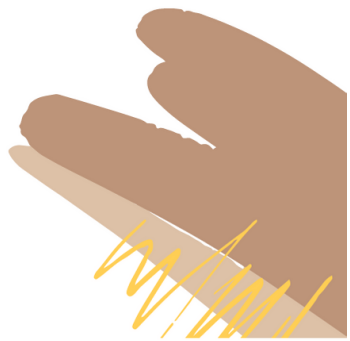
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I MENGUKUR PEMBANGUNAN MANUSIA	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Mengukur Pembangunan Manusia	6
1.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	9
BAB 2 METODOLOGI IPM	15
2.1 Dimensi Pembentuk IPM	16
2.2 Sumber Data	18
2.3 Teknik Penghitungan	19
2.4 Pertumbuhan IPM	24
2.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	25
BAB 3 CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA	33
3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang	34
3.2 Perkembangan Dimensi IPM Kota Tanjungpinang	38
3.2.1 Dimensi Kesehatan	39
3.2.2 Dimensi Pengetahuan	41
3.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak	46
3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungpinang	49
3.2 Perkembangan Dimensi IPG Kota Tanjungpinang	52
3.2.1 Dimensi Kesehatan	53
3.2.2 Dimensi Pengetahuan	55
3.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak	58



BAB 4	UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA	63
4.1	Tenaga Medis dan Sarana Kesehatan	63
4.2	Sanitasi Rumah Tinggal.....	66
4.3	Tenaga Pendidik dan Sarana Pendidikan.....	69
4.4	Partisipasi Sekolah	71
4.5	Kemiskinan	73
4.6	Ketenagakerjaan	74
4.7	Produk Domestik Regional Bruto	76
4.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	79

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>



DAFTAR TABEL

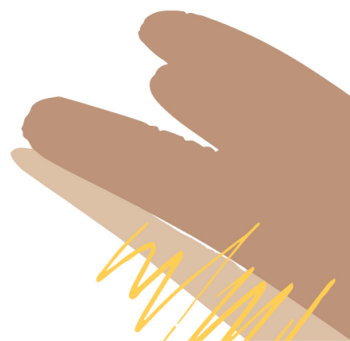
Tabel 2.1	Nilai Maksimum dan Minimum Setiap Komponen IPM	17
Tabel 2.2	Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir	21
Tabel 3.1	Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2020	32
Tabel 3.2	Perkembangan Indikator pada Dimensi Pembentuk IPM Kota Tanjungpinang, 2016-2020	33
Tabel 3.3	Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Tanjungpinang, 2016-2020	43
Tabel 3.4	Perkembangan IPG Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota, 2017 - 2020.....	52
Tabel 4.1	Indikator Kemiskinan Kota Tanjungpinang, 2019-2020	59
Tabel 4.2	Indikator Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang, 2019-2020	60
Tabel 4.3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang (Miliar Rupiah), 2019-2020	62
Tabel 4.4	Peranan Sektor Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Tanjungpinang (persen) 2019-2020	63



Tabel 4.5	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Kota Tanjungpinang (Miliar Rupiah), 2019-2020	65
-----------	--	----

Tabel 4.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Tanjungpinang (persen) 2019-2020.....	66
-----------	--	----

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

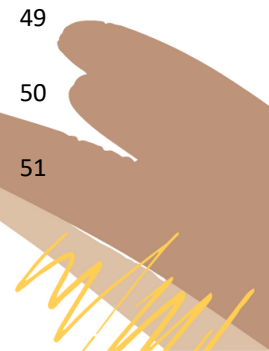


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Daftar Komoditas untuk Penghitungan PPP	23
Gambar 3.1	Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang 2010-2020.....	30
Gambar 3.2	Laju Pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang, 2011-2020.....	31
Gambar 3.3	Pencapaian Umur Harapan Hidup (Tahun) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional 2020	34
Gambar 3.4	Umur Harapan Hidup (Tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020	35
Gambar 3.5	Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dan Nasional, 2020	37
Gambar 3.6	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020	38
Gambar 3.7	Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dan Nasional, 2020	39
Gambar 3.8	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2020	39
Gambar 3.9	Pencapaian Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dan Nasional (000 Rp per Orang per Tahun), 2020	41
Gambar 3.10	Pengeluaran per Kapita Setahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020	42



Gambar 3.11	Perkembangan IPM Perempuan, IPM Laki-laki dan IPG Kota Tanjungpinang 2017-2020.....	50
Gambar 3.12	Laju Pertumbuhan IPM Perempuan, IPM Laki-laki dan IPG Kota Tanjungpinang 2017-2020.....	51
Gambar 3.13	Perkembangan UHH Perempuan, UHH Laki-laki dan UHH Laki-laki+ Perempuan Kota Tanjungpinang 2017-2020.....	54
Gambar 3.14	Perkembangan Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Kota Tanjungpinang 2020.....	55
Gambar 3.15	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin, Kota Tanjungpinang 2017 – 2020.....	56
Gambar 3.16	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota Tanjungpinang 2020.....	57
Gambar 3.17	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin, Kota Tanjungpinang 2017 – 2020.....	58
Gambar 3.18	Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah) Kota Tanjungpinang 2017 – 2020.....	60
Gambar 4.1	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungpinang 2019-2020	49
Gambar 4.2	Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Tanjungpinang 2019-2020	49
Gambar 4.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2020	50
Gambar 4.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Atap Rumah Terluas, 2020	51



Gambar 4.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Lantai Rumah Terluas, 2020	51
Gambar 4.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Dinding Rumah Terluas, 2020	51
Gambar 4.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020.....	52
Gambar 4.8	Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2020	54
Gambar 4.9	Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2020	54
Gambar 4.10	Angka Partisipasi Sekolah (persen) Menurut Kelompok Umur, 2019-2020	55
Gambar 4.11	Angka Partisipasi Kasar (persen) Menurut Kelompok Umur, 2019-2020	56
Gambar 4.12	Angka Partisipasi Murni (persen) Menurut Kelompok Umur, 2019-2020	57
Gambar 4.13	Persentase Pekerja Menurut Lapangan Usaha di Kota Tanjungpinang, 2020	61
Gambar 4.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan Nasional (persen) 2016-2020	68

BAB 1

MENGUKUR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER

Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, dibangun melalui 3 dimensi dasar.

Dimensi IPM



Pengetahuan
(*knowledge*)



Umur panjang dan
hidup sehat
(*a long healthy life*)



Standar hidup layak
(*decent standart of living*)

Kategori Capaian IPM

1. $IPM < 60$: IPM Rendah
2. $60 \leq IPM < 70$: IPM Sedang
3. $70 \leq IPM < 80$: IPM Tinggi
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi



BAB I

MENGUKUR PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya, sehingga seharusnya kualitas manusia adalah tujuan utama dalam pembangunan. Paradigma ini baru muncul setelah dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan sebelumnya yang hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi. Sebelum tahun 1990, dunia seolah lupa arti pentingnya manusia terhadap pembangunan ekonomi. Perhatian dunia hanya tertuju pada diskusi ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan, dan modal. Faktanya, masih kerap dijumpai negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga disertai dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, dan masalah sosial lainnya yang berhubungan dengan manusia.

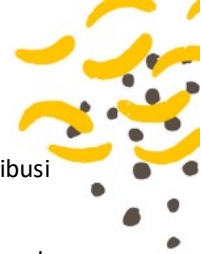
Tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) menerbitkan laporan untuk menanggapi isu yang sedang berkembang pada saat itu. Dalam laporan yang berjudul *Human Development Report* (HDR) 1990, UNDP menegaskan bahwa tujuan utama dari pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Laporan HDR edisi pertama tersebut secara jelas menekankan pentingnya pembangunan yang berpusat pada manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia sejatinya menempatkan manusia sebagai tujuan akhir, sekaligus menjadi *input* pembangunan.



Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP memberikan nuansa baru dalam memahami pembangunan. Cara pandang pembangunan manusia berbeda dengan pendekatan pembangunan konvensional seperti pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal manusia, pengembangan sumber daya manusia, kesejahteraan masyarakat atau kebutuhan dasar manusia. Perbedaan cara pandang pendekatan tersebut antara lain:

- Pertumbuhan PDB merupakan hal yang diperlukan dalam pembangunan manusia, tetapi pertumbuhan PDB saja tidaklah cukup. Kemajuan manusia dalam masyarakat mungkin saja masih rendah meskipun PDB atau pendapatan per kapita tumbuh tinggi, atau sebaliknya.
- Teori pembentukan modal manusia dan pengembangan sumber daya manusia memandang manusia terutama sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Keduanya hanya berfokus dengan sisi penawaran, dimana manusia dipandang sebagai alat untuk memajukan produksi komoditas. Hal ini menggambarkan adanya hubungan yang kuat karena manusia adalah agen aktif dari kegiatan produksi. Akan tetapi, manusia memiliki nilai lebih dari barang modal untuk kegiatan produksi. Manusia juga merupakan tujuan akhir dan penerima manfaat dari proses ini.
- Pendekatan kesejahteraan masyarakat memandang manusia sebagai penerima manfaat dari proses pembangunan daripada sebagai peserta di dalamnya.



Pendekatan ini lebih menekankan kebijakan distribusi daripada struktur produksi.

- Pendekatan kebutuhan dasar berfokus pada kelompok barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu kelompok masyarakat, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan dan air. Pendekatan ini berfokus pada penyediaan barang dan jasa dibandingkan masalah pilihan manusia.

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Isu gender menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. Kesenjangan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga tercakup pada hampir seluruh tujuan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.



1.2 Mengukur Pembangunan Manusia & Gender

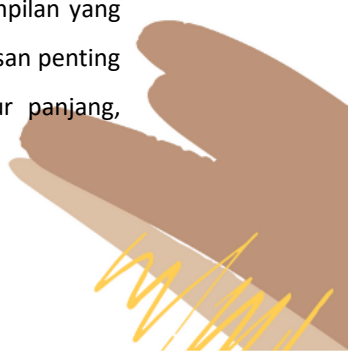
UNDP menggarisbawahi tentang ide dasar pembangunan manusia, yaitu:

- **Manusia**

Pembangunan manusia harus berfokus pada peningkatan kualitas kehidupan yang dijalani oleh masyarakat dibandingkan dengan hanya mengandalkan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan secara otomatis meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam sudut pandang ini, pertumbuhan ekonomi dilihat sebagai alat untuk pembangunan, bukan tujuan akhir pembangunan.

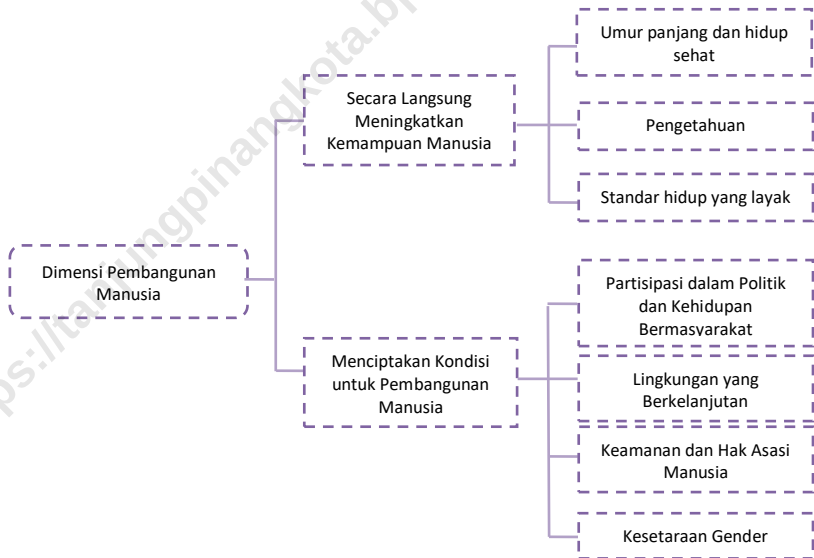
- **Kesempatan**

Pembangunan manusia pada prinsipnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada manusia untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia harus mampu mengembangkan kemampuan manusia dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menggunakan kemampuannya. Misalnya, mendidik seorang perempuan secara tidak langsung akan membangun keterampilannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak akan banyak berguna jika dia tidak diberi akses ke pekerjaan atau tidak memiliki keterampilan yang tepat dalam pasar tenaga kerja lokal. Tiga landasan penting dalam pembangunan manusia adalah berumur panjang,



sehat dan kreatif; berpengetahuan luas; dan memiliki akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk standar hidup yang layak.

Banyak hal lain yang juga penting, terutama dalam membantu menciptakan kondisi yang tepat untuk pembangunan manusia. Beberapa di antaranya terdapat dalam gambar di bawah ini. Apabila dasar-dasar pembangunan manusia dapat tercapai, masyarakat dapat membuka peluang untuk kemajuan dalam aspek kehidupan lainnya.



Sumber: <http://hdr.undp.org/en/content/what-human-development>

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia



yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sejak saat itu, IPM dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan aspek lain dalam kehidupan.

Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup:

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. Pengetahuan (*knowledge*); dan
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Pentingnya harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor tidak langsung yang berkaitan erat dengan harapan hidup (seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik).

Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan untuk kehidupan produktif dalam masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah





menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah penguasaan sumber daya yang dibutuhkan untuk kehidupan yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat tidak semua wilayah di Indonesia memiliki indikator tersebut, maka dipilih alternatif lain dengan memanfaatkan indikator pendapatan/pengeluaran. Indikator ini tersedia hingga level wilayah kabupaten/kota. Pertimbangan lebih lanjut adalah bahwa indikator tersebut harus mencerminkan *diminishing return* untuk mengubah pendapatan/pengeluaran menjadi kemampuan manusia. Dengan kata lain, manusia tidak perlu sumber daya keuangan yang berlebihan untuk memastikan kehidupan yang layak. Aspek ini diperhitungkan dengan menggunakan logaritma pengeluaran per kapita yang mencerminkan indikator pendapatan.

IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik.

1.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia & Gender

Konsep pembangunan manusia yang dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi

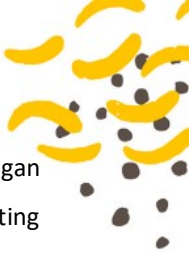


kemiskinan absolut, dan mencegah kerusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Konsep pembangunan manusia juga telah menarik perhatian para pembuat kebijakan di Indonesia. Dibandingkan dengan pendekatan ekonomi tradisional yang lebih memperhatikan peningkatan produksi dan produktivitas, pendekatan pembangunan manusia dianggap lebih mendekati tujuan utama pembangunan sebagaimana dikemukakan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993, yaitu ‘pembangunan manusia seutuhnya’. Indeks Pembangunan Manusia juga menyajikan ukuran kemajuan pembangunan yang lebih memadai dan lebih menyeluruh daripada ukuran tunggal pertumbuhan PDB/PDRB per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir, berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar





hidup layak yang diukur dengan pengeluaran konsumsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

Sebagai indikator komposit, IPM mempunyai manfaat terbatas, terutama kalau disajikan tersendiri hanya dapat menunjukkan status pembangunan manusia suatu daerah. Namun demikian, manfaat yang terbatas tersebut dapat diperluas apabila dilakukan perbandingan antarwaktu dan antardaerah, sehingga posisi relatif suatu daerah terhadap daerah yang lain dapat diketahui serta kemajuan/pencapaian antarwaktu di suatu daerah dan perbandingannya dengan pencapaian daerah lain dapat dibahas.

IPM bernilai 0-100 yang semakin tinggi menyatakan status pencapaian yang lebih tinggi. Untuk melihat capaian tersebut, IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. $IPM < 60$: IPM rendah,
2. $60 \leq IPM < 70$: IPM sedang,
3. $70 \leq IPM < 80$: IPM tinggi,
4. $IPM \geq 80$: IPM sangat tinggi.

Oleh karena IPM merupakan indikator penting dan terukur dalam menggambarkan perkembangan pembangunan manusia, seringkali IPM dijadikan sebagai salah satu indikator target pembangunan untuk menentukan level pembangunan di suatu wilayah. Penetapan IPM sebagai target pembangunan setidaknya akan menjadi asumsi makro yang dipilih, walaupun sebenarnya

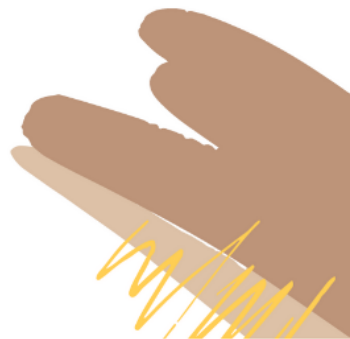




belum mencakup pembangunan manusia secara menyeluruh. Namun demikian, indikator dalam IPM secara teknis dipandang mudah dipahami, valid, reliabel, dan parsimoni, serta terstandardisasi, sehingga mudah dibandingkan antarwilayah dan antarwaktu.

Satu alasan lagi akan pentingnya angka IPM, yaitu fakta bahwa IPM merupakan salah satu komponen kebutuhan fiskal daerah untuk penghitungan DAU (Dana Alokasi Umum) di samping komponen lainnya seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan PDRB per kapita. IPM menjadi salah satu komponen kebutuhan fiskal daerah karena dipandang sebagai variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, semakin tinggi nilai IPM suatu daerah maka besaran DAU yang akan diterima oleh daerah akan semakin berkurang, karena daerah dipandang sudah lebih sejahtera.

IPG digunakan untuk mengukur apakah pembangunan gender sudah seimbang atau merata. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Sebaliknya semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.



BAB 2

METODOLOGI IPM DAN IPG

DIMENSI PEMBENTUK IPM

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$



$$I_{\text{Pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}, \text{ dimana:}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$



$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

dimana $\ln$: logaritma natural



**IPM MERUPAKAN RATA-RATA GEOMETRIK
DARI KETIGA INDEKS**

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{Pengetahuan}} \times I_{\text{Pengeluaran}}} \times 100$$

BAB II

METODOLOGI IPM DAN IPG

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan manusia, UNDP mengembangkan metodologi baru dalam penghitungan pembangunan. Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, dimana dalam metode baru tersebut terdapat beberapa perubahan pada variabel yang digunakan. Perubahan tersebut adalah:

1. Penggantian indikator angka melek huruf dan angka partisipasi kasar dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.
2. Penggantian indikator PDRB perkapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
3. Perubahan penghitungan rata-rata indeks dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Metode penghitungan IPM yang dilakukan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM yang telah diperbarui dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data sampai tingkat kabupaten/kota. Terkait dengan hal ini, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP.

2.1 Dimensi Pembentuk IPM

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu:

- Dimensi Kesehatan; menghasilkan Indeks Kesehatan berupa Umur Harapan Hidup.
- Dimensi Pendidikan; menghasilkan Indeks Pengetahuan yang diperoleh dari rata-rata aritmatik atas indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.
- Dimensi Standar Hidup Layak; menghasilkan Indeks Pengeluaran berupa indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan.

Untuk mendapatkan ketiga indeks tersebut, formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dimensi Kesehatan:

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

Dimensi Pendidikan:

$$I_{\text{Pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}, \text{ dimana:}$$

$$I_{\text{HLS}} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$I_{\text{RLS}} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

Dimensi Standar Hidup Layak:

$$I_{\text{Pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

dimana ln: logaritma natural

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Setiap Komponen IPM

Dimensi	Indikator	Minimum	Maksimum
(1)	(2)	(3)	(4)
Kesehatan	Umur harapan hidup (tahun)	20	85
Pengetahuan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	18
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	0	15
Standar Hidup Layak	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Rp)	1.007.436 ^{a)}	26.572.352 ^{b)}

Keterangan:

- Garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris), yaitu di Tolikara-Papua.
- Nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{Pengetahuan}} \times I_{\text{Pengeluaran}}} \times 100$$



2.2 Sumber Data

Angka IPM merupakan indeks komposit yang melibatkan beberapa indikator. Maka dari itu, dalam penghitungannya memerlukan data dari beberapa sumber pula.

Indikator Umur Harapan Hidup bersumber dari data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional), yaitu dengan menggunakan variabel Anak Lahir Hidup dan Anak Masih Hidup, yang selanjutnya dihitung secara tidak langsung (*indirect estimation*) dengan paket program *Mortpack*.

Indikator pada dimensi pengetahuan, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, juga menggunakan data Susenas. Harapan lama sekolah menggunakan variabel partisipasi sekolah menurut kelompok umur yang dikoreksi dengan data siswa yang bersekolah di pesantren dari Direktorat Pendidikan Islam. Untuk indikator rata-rata lama sekolah, mengkombinasikan variabel partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang pernah diduduki, kelas yang sedang dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Sumber data untuk indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan meliputi data Susenas Modul Konsumsi, serta data IHK (Indeks Harga Konsumen). Data IHK digunakan untuk menjadikan pengeluaran per kapita menjadi harga konstan dan berfungsi dalam penghitungan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

2.3 Teknik Penghitungan

Angka Harapan Hidup

- Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPACK (metode *Trussel* dengan model *West*), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

Harapan Lama Sekolah

- i. Menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas).
- ii. Menghitung jumlah penduduk yang masih bersekolah menurut umur (7 tahun ke atas).
- iii. Menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur.
- iv. Menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur, sehingga diperoleh Harapan Lama Sekolah belum terkoreksi
- v. Menghitung faktor koreksi pesantren, yaitu membagi jumlah santri sekolah dan mukim dengan jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas, kemudian hasilnya ditambah 1
- vi. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diperoleh dengan mengalikan Angka Harapan Sekolah belum terkoreksi dengan Faktor Koreksi Pesantren



$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim x jumlah santri sekolah

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah santri mukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}} + 1$$

Rata-rata Lama Sekolah

- i. Menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas.
- ii. Menghitung lamanya sekolah
 - Jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolah = 0.
 - Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah di SD s.d. S1, maka:
lama sekolah = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah S2 atau S3, maka:

lama sekolah = konversi ijazah terakhir + 1

- Jika partisipasi sekolah yaitu tidak bersekolah lagi, tetapi tidak tamat di kelas terakhir, maka:

lama sekolah = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1

- Jika partisipasi sekolah yaitu tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang tertentu, maka:

lama sekolah = konversi ijazah terakhir

Tabel 2.2
Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Lama Sekolah (tahun)
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

- iii. Menghitung rata-rata lama sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

- i. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita.
 - Menghitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
 - Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.
 - Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (Y'_t) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan $\times 12/1000$.
- ii. Menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan.

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y'_t : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$: IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

- iii. Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP).

- Menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

- P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
- V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
- Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK.

- Menghitung paritas daya beli berbasis formula Rao.

$$\text{Paritas Daya Beli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

Gambar 2.1
Daftar Komoditas untuk Penghitungan PPP

Makanan		Nonmakanan	
Beras	Pepaya	Rumah sendiri/bebas sewa	
Tepung terigu	Minyak kelapa	Rumah kontrak	
Ketela pohon/singkong	Minyak goreng lainnya	Rumah sewa	
Kentang	Kelapa	Rumah dinas	
Tongkol/tuna/cakalang	Gula pasir	Listrik	
Kembung	Teh	Air PAM	
Bandeng	Kopi	LPG	
Mujair	Garam	Minyak tanah	
Mas	Kecap	Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat nyamuk dll)	
Lele	Penyedap masakan/vetsin	Perlengkapan mandi	
Ikan segar lainnya	Mie instan	Barang kecantikan	
Daging sapi	Roti manis/roti lainnya	Perawatan kulit,muka,kuku,rambut	
Daging ayam ras	Kue kering	Sabun cuci	
Daging ayam kampung	Kue basah	Biaya RS Pemerintah	
Telur ayam ras	Makanan gorengan	Biaya RS Swasta	
Susu kental manis	Gado-gado/ketoprak	Puskesmas/pustu	
Susu bubuk	Nasi campur/rames	Praktek dokter/poliklinik	
Susu bubuk bayi	Nasi goreng	SPP	
Bayam	Nasi putih	Bensin	
Kangkung	Lontong/ketupat sayur	Transportasi/pengangkutan umum	
Kacang panjang	Soto/gule/sop/rawon/cincang	Pos dan Telekomunikasi	
Bawang merah	Sate/tongseng	Pakaian jadi laki-laki dewasa	
Bawang putih	Mie bakso/mie rebus/mie goreng	Pakaian jadi perempuan dewasa	
Cabe merah	Makanan ringan anak	Pakaian jadi anak-anak	
Cabe rawit	Ikang (goreng/bakar dll)	Alas kaki	
Tahu	Ayam/daging (goreng dll)	Minyak Pelumas	
Tempe	Makanan jadi lainnya	Meubelair	
Jeruk	Air kemasan galon	Peralatan Rumah Tangga	
Mangga	Minuman jadi lainnya	Perlengkapan perabot rumah tangga	
Salak	Es lainnya	Alat-alat Dapur/Makan	
Pisang ambon	Roko kretek filter		
Pisang raja	Rokok kretek tanpa filter		
Pisang lainnya	Rokok putih		

iv.

Menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan.

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Y_t^{**} : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

2.4 Pertumbuhan IPM

Untuk melihat dan mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu, digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan: IPM_t = IPM pada suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM pada suatu wilayah pada tahun t-1

2.5 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Bagaimana Metode Baru?

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)



2) pengetahuan (*knowledge*); dan

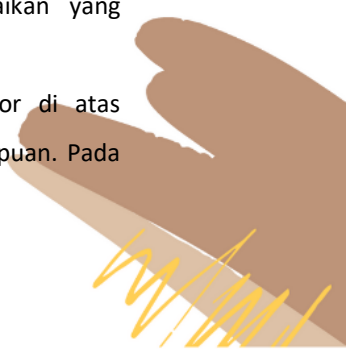
3) standar hidup layak (*decent standard of living*)

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada





indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing-masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing komponen.

Tabel 2.1 Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

Indikator	Minimum		Maksimum	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(2)	(3)	(4)		
Umur harapan hidup (tahun)	17,5	22,5	82,5	87,5
Harapan Lama Sekolah (tahun)	0	0	18	18
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	0	0	15	15

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan Perempuan, digunakan rumus yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang



dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut:

$$IPM_p = \sqrt[3]{I_{Kesehatan_p} \times I_{Pengetahuan_p} \times I_{Pengeluaran_p}}$$

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{Kesehatan_L} \times I_{Pengetahuan_L} \times I_{Pengeluaran_L}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$IPM = \frac{IPM_p}{IPM_L} \times 100$$

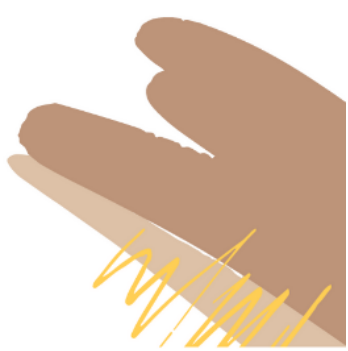
Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.



Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

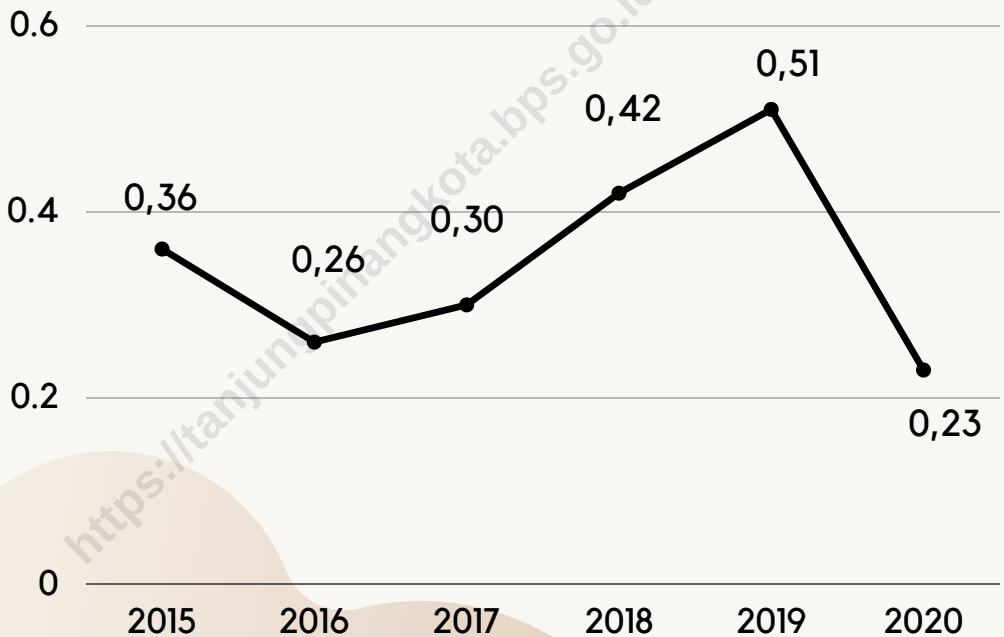


BAB 3

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER

Laju pertumbuhan IPM

Kota Tanjungpinang tahun 2015 - 2020



IPM Kota Tanjungpinang
tahun 2020 adalah 78,91 persen.





BAB III

CAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER

Menurut UNDP, salah satu cara untuk melakukan pengukuran terhadap kualitas manusia di suatu wilayah adalah melalui penilaian pembangunan manusia. Indikator yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indonesia telah melakukan penghitungan IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996 dan dilakukan setiap tiga tahun sekali. Namun sejak tahun 2004 penghitungan IPM pada tingkat regional mulai dilakukan secara rutin setiap tahun. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan manusia, UNDP mengembangkan metodologi baru dalam penghitungan pembangunan.

Pada tahun 2010, UNDP secara resmi memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, dimana dalam metode baru tersebut terdapat beberapa perubahan pada variabel yang digunakan. Perubahan tersebut diantaranya dilakukan dengan: 1. Penggantian indikator angka melek huruf dan angka partisipasi kasar dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. 2. Penggantian indikator PDRB perkapita dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. 3. Perubahan penghitungan rata-rata indeks dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik. Metode penghitungan IPM yang dilakukan BPS mengacu pada metodologi yang digunakan UNDP. Sejak tahun 2015, BPS telah menggunakan penghitungan IPM yang telah diperbarui dengan melakukan penyesuaian pada beberapa indikator. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data sampai tingkat



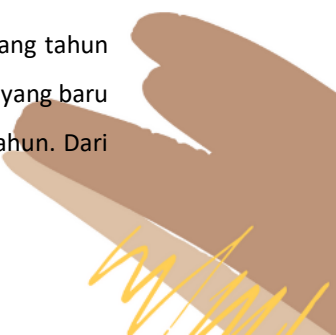


kabupaten/kota. Terkait dengan hal ini, angka IPM Indonesia hasil penghitungan BPS tidak dapat dibandingkan dengan angka IPM Indonesia yang dihitung oleh UNDP. Selanjutnya, agar ukuran ini juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya ukuran terpisah antara IPM laki-laki dan IPM perempuan, maka analisis tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.

3.1 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kota Tanjungpinang

Berdasarkan hasil penghitungan, IPM Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 tercatat sebesar 78,91. Angka ini merupakan kombinasi dari tiga dimensi, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili dengan indikator umur harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan diwakili dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sementara dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Umur harapan hidup saat lahir di Kota Tanjungpinang tahun 2020 mencapai 72,10. Angka ini menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir diperkirakan dapat menjalani hidup hingga usia 72 tahun. Dari





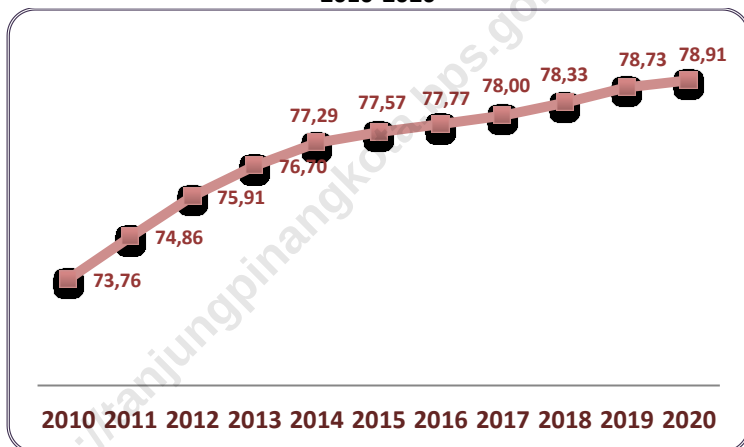
sisi pendidikan, penduduk kota Tanjungpinang yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata sudah menempuh pendidikan formal 10 tahun atau telah menyelesaikan kelas X SMA. Selain itu, penduduk berusia 7 tahun yang mulai bersekolah diperkirakan dapat menjalani pendidikan hingga 14,12 tahun, setara dengan tamat jenjang pendidikan diploma II. Pada aspek ekonomi, pengeluaran per kapita yang disesuaikan mencapai Rp 15.498.000 per kapita per tahun.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Tanjungpinang. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya agar lebih terarah.

Sejak tahun 2010, pembangunan manusia di kota Tanjungpinang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata pertumbuhan IPM di kota Tanjungpinang selama kurun waktu 2011-2020 adalah 0,68 persen per tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terjadi kenaikan IPM sebesar 5,15 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kota Tanjungpinang. Pada tahun 2020, IPM Kota Tanjungpinang tumbuh 0,23 persen atau meningkat sebesar 0,18 poin dibanding tahun sebelumnya, sehingga mencapai 78,91. Capaian pertumbuhan IPM pada 2020 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang

tumbuh sebesar 0,51 persen. Dengan capaian ini, status pembangunan manusia di Kota Tanjungpinang masih berada pada level tinggi (berada pada kisaran antara $70 \leq \text{IPM} < 80$). Posisi ini belum berubah sejak tahun 2010 dan untuk meningkatkan status menjadi sangat tinggi memerlukan upaya yang keras dan dalam waktu yang cukup lama.

Gambar 3.1
Perkembangan IPM Kota Tanjungpinang
2010-2020

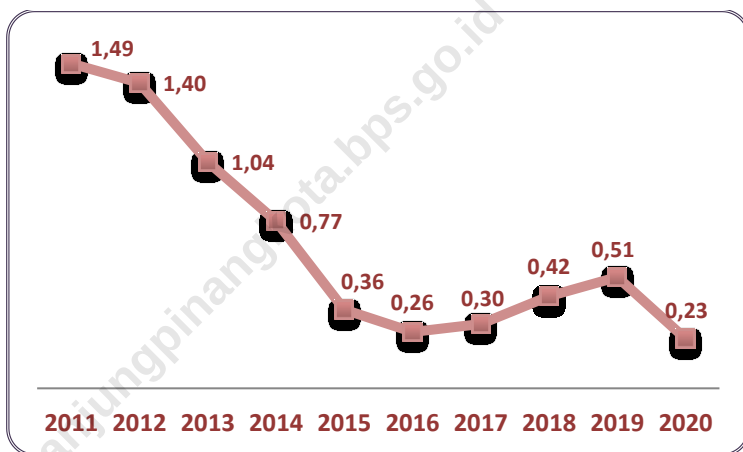


Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Pada Gambar 3.2, tampak bahwa pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang menunjukkan angka yang positif, yang berarti bahwa masih terdapat kemajuan pembangunan manusia di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2011-2020, pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang mengalami perlambatan, yaitu dari tumbuh sebesar 1,49 persen pada tahun 2011 melambat menjadi sebesar 0,23 persen di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan

bahwasanya pembangunan manusia di Kota Tanjungpinang terus berkesinambungan dengan selalu adanya peningkatan pada segenap aspek pendukungnya. Meskipun upaya pembangunan manusia terjadi perlambatan, upaya tersebut masih bisa tumbuh positif.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan IPM Kota Tanjungpinang,
2011-2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Jika melihat angka Provinsi Kepulauan Riau, IPM provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 75,59, menempati urutan ke-4 se-Indonesia. IPM Kota Tanjungpinang dalam sepuluh tahun terakhir nilainya selalu di atas angka 75, masih diatas IPM Provinsi Kepulauan Riau dan menempati urutan kedua jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan IPM terendah di Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dilihat berdasarkan besaran IPM pada tahun 2020, dua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau masuk pada kategori sedang, empat kabupaten/kota masuk dalam kategori tinggi dan satu kota lainnya masuk dalam kategori sangat tinggi. Capaian ini tentu masih harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang semakin berkualitas.

Tabel 3.1
Perkembangan IPM Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota, 2016 - 2020

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Karimun	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44
Bintan	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13
Natuna	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72
Lingga	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29
Kepulauan Anambas	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80
Batam	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11
Tanjungpinang	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91
Kepulauan Riau	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

3.2 Perkembangan Dimensi IPM Kota Tanjungpinang

IPM adalah indeks komposit yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan suatu daerah dalam satu angka tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik



suatu daerah yang dipresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. Upaya yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup manusia dilaksanakan seiring dengan peningkatan indikator-indikator sosial yang berkaitan dengan pembangunan manusia.

Tabel 3.2
Perkembangan Indikator pada Dimensi Pembentuk IPM
Kota Tanjungpinang, 2016-2020

Tahun	Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (ribu Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	71,74	14,06	9,96	14 645
2017	71,84	14,07	9,97	14 881
2018	71,93	14,08	9,98	15 292
2019	72,02	14,09	9,99	15 838
2020	72,10	14,12	10,25	15 498

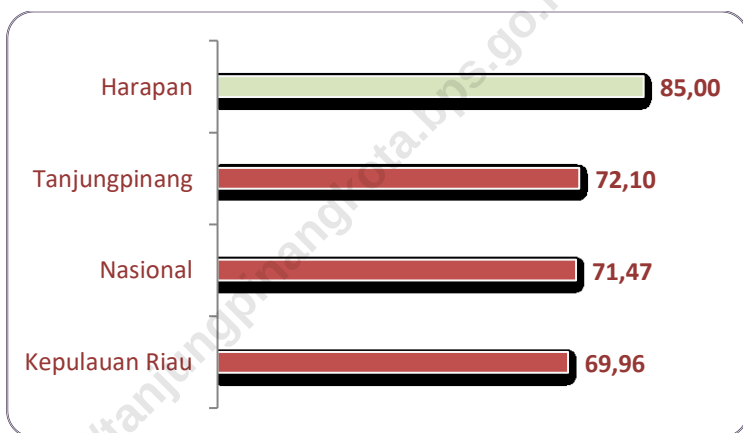
Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

3.2.1 Dimensi Kesehatan

Dimensi Kesehatan memiliki satu indikator pembentuk yaitu indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Hidup sehat dan panjang umur merupakan dambaan setiap orang. Untuk dapat berumur panjang, diperlukan kesehatan yang lebih baik. Pembangunan manusia memperluas pilihan-pilihan manusia dengan mensyaratkan berumur panjang. Proksi umur panjang dan sehat yang digunakan dalam pembangunan manusia adalah indikator umur harapan hidup saat lahir. Indikator ini menjadi salah satu indikator gambaran kesehatan

masyarakat. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik.

Gambar 3.3
Pencapaian Umur Harapan Hidup (tahun)
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional
2020

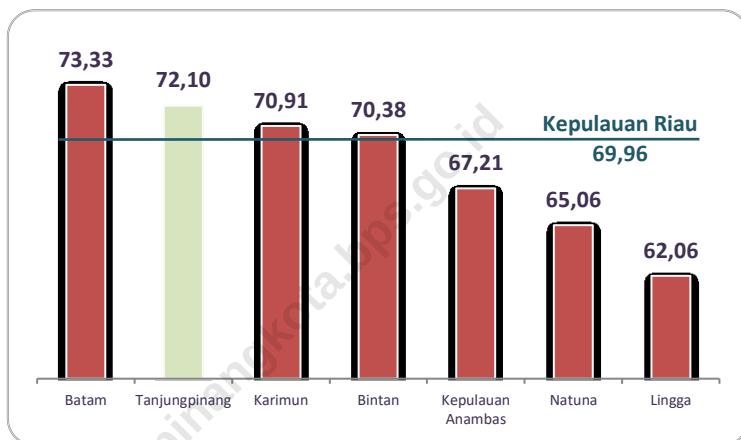


Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Perkembangan angka harapan hidup Kota Tanjungpinang dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Dari angka harapan hidup sebesar 71,65 tahun pada tahun 2015 meningkat menjadi 72,10 tahun pada tahun 2020, yang artinya sudah mencapai 72 tahun. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kemampuan penduduk Kota Tanjungpinang untuk hidup lebih lama dan hidup sehat termasuk kategori tinggi, dimana umur harapan hidup yang

menjadi harapan atau *aspirational target* menurut UNDP adalah 85 tahun.

Gambar 3.4
Umur Harapan Hidup (tahun) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau, 2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Umur harapan hidup menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berkisar antara 62,06 hingga 73,33 tahun pada 2020. Umur harapan hidup di Kota Tanjungpinang merupakan tertinggi kedua setelah Kota Batam, dan merupakan satu dari empat kabupaten/kota di Kepulauan Riau yang nilainya di atas umur harapan hidup provinsi (Gambar 3.4). Kabupaten/kota dengan umur harapan hidup di atas angka provinsi adalah Batam, Tanjungpinang, Karimun, dan Bintan.



3.2.2 Dimensi Pengetahuan

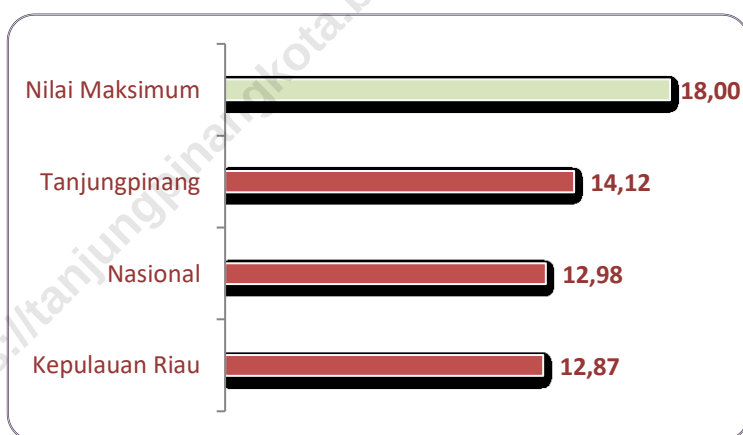
Dimensi pengetahuan dalam penghitungan IPM merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah (HLS) dengan rata-rata lama sekolah (RLS). Angka HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas, sedangkan RLS dihitung dari usia 25 tahun ke atas. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan umur yang sama dengan UNDP. Penggunaan usia 7 tahun pada penghitungan HLS dilakukan agar sejalan dengan ketentuan pada undang-undang pendidikan nasional, sedangkan penggunaan usia 25 tahun pada RLS dilakukan dengan pertimbangan bahwa umumnya penduduk usia 25 tahun ke atas tidak bersekolah kembali.

Berdasarkan seri data tahun 2010-2020, HLS dan RLS menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pertumbuhan HLS relatif lebih lambat dibandingkan dengan angka RLS. Hal ini disebabkan karena pada HLS masih terdapat ruang perbaikan yang cukup luas, terutama pada kelompok pendidikan dasar. HLS menggambarkan ukuran capaian program-program pendidikan dalam jangka pendek, sedangkan RLS menggambarkan ukuran capaian dalam jangka panjang. Kedua indikator ini menggambarkan penambahan (*flow*) dan capaian (*stock*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah. Secara rata-rata, HLS tumbuh sebesar 1,37 persen per tahun selama tahun 2011-2020, sedangkan RLS tumbuh sebesar 1,16 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Pada tahun 2015, angka harapan lama sekolah baru mencapai 14,05 tahun dan hanya meningkat 0,07 tahun menjadi 14,12 tahun pada tahun 2020. Angka ini menjelaskan bahwa anak-anak di Kota Tanjungpinang yang baru masuk ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2020 memiliki peluang bersekolah selama 14 tahun atau setara dengan diploma II.

Gambar 3.5
Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dan Nasional, 2020



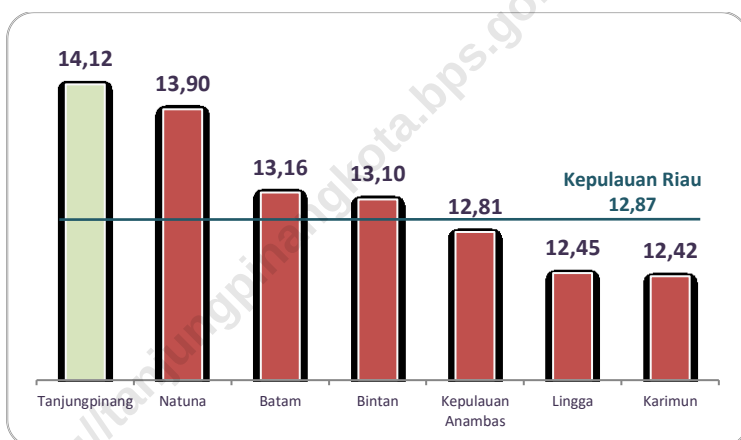
Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Standar/ nilai maksimum angka harapan lama sekolah berdasarkan UNDP dan BPS adalah 18 tahun, setara dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan jenjang Strata II di sebagian besar negara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa angka harapan lama sekolah di Kota Tanjungpinang masih jauh dari target

namun sudah lebih baik dibandingkan rata-rata Kepulauan Riau dan Nasional.

Jika dilihat menurut kabupaten/ kota di Kepulauan Riau, kota Tanjungpinang memiliki nilai Angka Harapan Lama Sekolah paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Gambar 3.6
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020



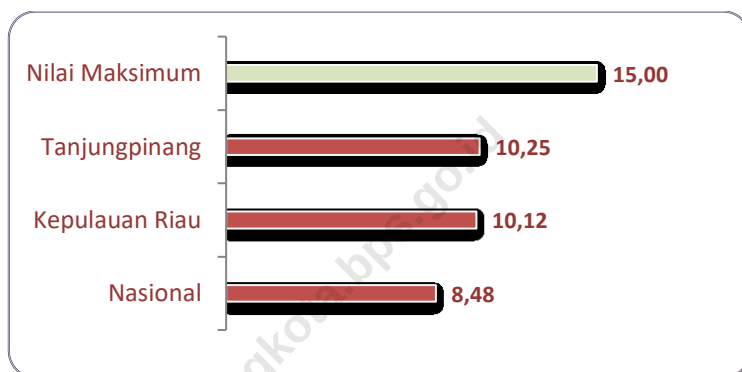
Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS pada tahun 2020 di Kota Tanjungpinang adalah sebesar 10,25. Angka ini menjelaskan bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tanjungpinang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,25 tahun atau menamatkan kelas 10 (tahun pertama SMA/ sederajat). RLS pada tahun 2020 ini meningkat 0,26 poin dibanding tahun sebelumnya dan 1,11 poin dibanding tahun 2010. RLS Kota Tanjungpinang masih jauh dari standar maksimum

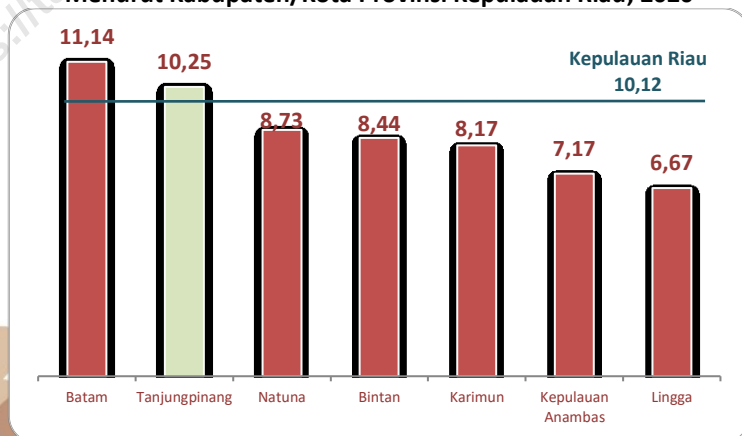
selama 15 tahun, namun masih lebih baik dibandingkan nasional yang hanya 8,48 tahun.

Gambar 3.7
Pencapaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)
Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dan Nasional, 2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Gambar 3.8
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau, 2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

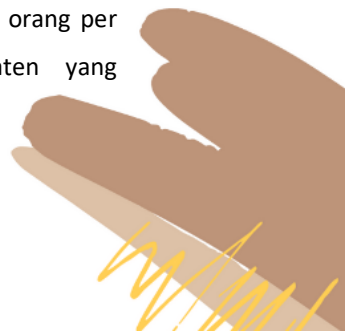


Angka rata-rata lama sekolah Kota Tanjungpinang menempati urutan kedua setelah Kota Batam yang angkanya cukup tinggi mencapai 11,14 tahun. Sementara itu, Kabupaten Lingga merupakan kabupaten dengan RLS paling rendah yang hanya sebesar 6,67. Jarak nilai RLS tertinggi dan terendah ini menunjukkan bahwa terjadinya disparitas yang cukup lebar antara penduduk perkotaan dan perdesaan dalam mengakses pendidikan.

3.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak

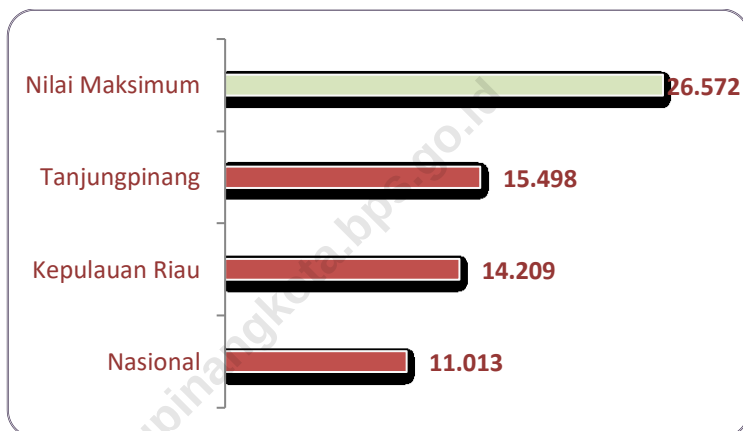
Dimensi terakhir dari pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Indikator ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian suatu wilayah. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita di Kota Tanjungpinang mencapai 15,498 juta rupiah. Angka tersebut meningkat 17,08 persen dibanding tahun 2010, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya justru turun sebesar 2,15 persen. Hal ini merupakan dampak pandemi COVID19 yang mengakibatkan berkurangnya pengeluaran penduduk pada tahun 2020.

Nilai pengeluaran per kapita Kota Tanjungpinang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Akan tetapi, nilai pengeluaran per kapita Kota Tanjungpinang baru mencapai 59,6 persen dari nilai maksimum indikator pengeluaran per kapita. Nilai maksimum yang sebesar Rp 26,57 juta per orang per tahun tersebut merupakan nilai tertinggi kabupaten yang



diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) atau perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan tahun 2025.

Gambar 3.9
Pencapaian Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan
di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri dan Nasional
(000 Rp per Orang per Tahun), 2020

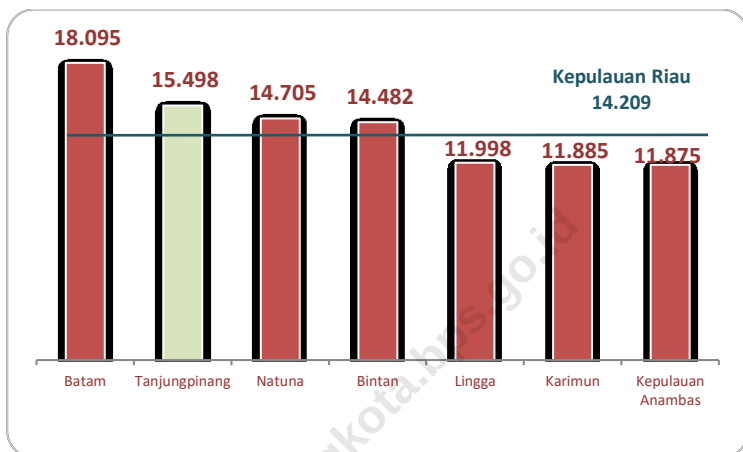


Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan di tahun 2020 Kota Tanjungpinang merupakan tertinggi ke dua di Kepulauan Riau (Gambar 3.10) tetapi selisih dengan Kota Batam masih sekitar Rp 2,3 juta. Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan pengeluaran per kapita terendah se Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar Rp 11,875 juta. Angka tersebut memiliki selisih yang cukup tinggi dengan Kota Batam yaitu sebesar Rp 6,22 juta. Perbedaan yang cukup jauh tersebut dapat disebabkan oleh jarak Kepulauan Anambas yang cukup jauh dari pusat kota dan keterbatasan akses untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik.

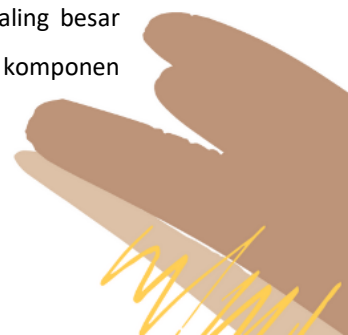


Gambar 3.10
Pengeluaran per Kapita Setahun yang Disesuaikan (ribu rupiah)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Sebelum menjadi angka IPM, indikator-indikator komponen IPM tersebut di atas dikonversi terlebih dahulu menjadi indeks komponen IPM (tabel 3.3). Dengan diterjemahkannya dalam indeks, posisi setiap dimensi komponen IPM akan lebih jelas terlihat karena skalanya sama, yaitu dari 0 hingga 100. Kondisi terakhir (tahun 2020) menunjukkan bahwa indeks yang paling tinggi adalah indeks pengeluaran, yaitu sebesar 83,52 persen, sedangkan indeks kesehatan berada di posisi 80,15 persen. Indeks yang masih berada di kisaran 70-an persen adalah indeks pengetahuan, yaitu sebesar 73,39 persen. Hal ini berarti bahwa komponen yang paling besar kontribusinya dalam menyusun angka IPM adalah komponen pengeluaran.



Tabel 3.3
Perkembangan Indeks Komponen IPM Kota Tanjungpinang,
2016-2020

Tahun	Indeks Kesehatan	Indeks Pengetahuan	Indeks Pengeluaran	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2016	79,60	72,26	81,79	77,77
2017	79,75	72,32	82,28	78,00
2018	79,89	72,38	83,12	78,33
2019	80,03	72,44	84,19	78,73
2020	80,15	73,39	83,52	78,91

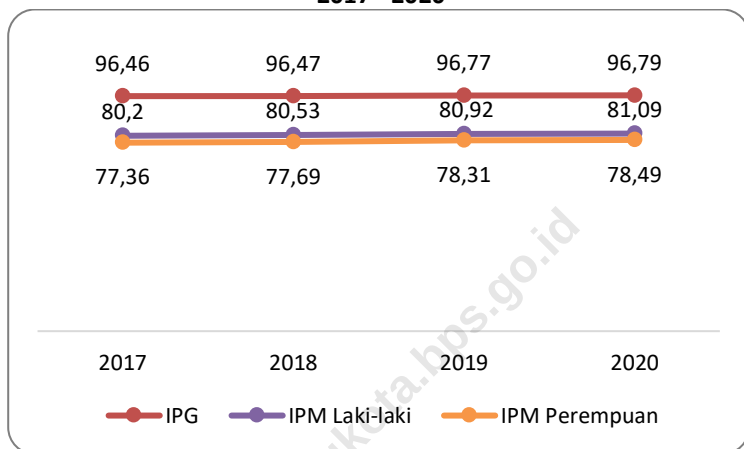
Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

3.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kota Tanjungpinang

IPG Kota Tanjungpinang mengalami tren yang meningkat selama tahun 2017 – 2020. Pada tahun 2017 IPG Kota Tanjungpinang sebesar 96,46 persen, dan pada tahun 2020 mencapai 96,79 persen, meningkat 0,33 poin dibanding tahun 2017. Tingkat IPM wanita di Kota Tanjungpinang masih berada di bawah laki-laki, meskipun begitu IPM wanita mengalami peningkatan yang lebih tinggi untuk tahun 2019-2020. IPM laki-laki dan perempuan di Kota Tanjungpinang sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan 80). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi antara perempuan dan laki-laki sudah baik.

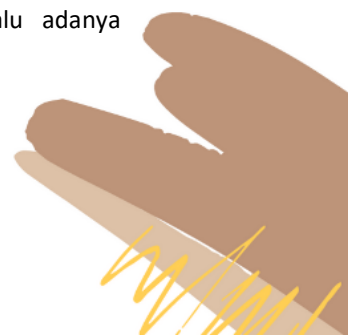


Gambar 3.11
Perkembangan IPM Perempuan,
IPM Laki-laki dan IPG Kota Tanjungpinang
2017 - 2020

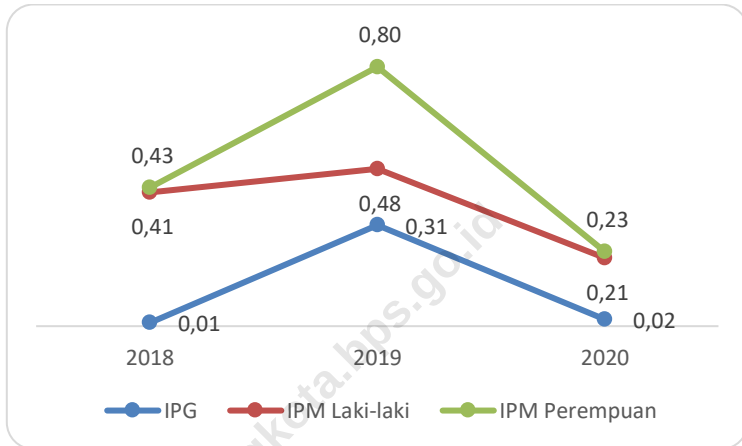


Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Pada Gambar 3.12, tampak bahwa pertumbuhan IPG, IPM laki-laki dan IPM Perempuan Kota Tanjungpinang menunjukkan angka yang positif, yang berarti bahwa masih terdapat kemajuan pembangunan gender di Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 2017-2020, pertumbuhan IPG Kota Tanjungpinang fluktuatif, yaitu dari tumbuh sebesar 0,01 persen pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 0,31 persen di tahun 2019 dan melambat pada tahun 2020 sebesar 0,02 persen. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pembangunan gender di Kota Tanjungpinang terus berkesinambungan dengan selalu adanya peningkatan pada segenap aspek pendukungnya.



Gambar 3.12
Laju Pertumbuhan IPM Perempuan,
IPM Laki-laki dan IPG Kota Tanjungpinang
2017 - 2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Jika melihat angka Provinsi Kepulauan Riau, IPG Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 93,31, menempati urutan ke-155 se-Indonesia. IPG Kota Tanjungpinang masih diatas IPG Provinsi Kepulauan Riau dan menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, Kabupaten Lingga adalah kabupaten dengan IPG terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat berdasarkan besaran IPG pada tahun 2020, Capaian ini tentu masih harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan gender yang semakin merata.



Tabel 3.4
Perkembangan IPG Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Kabupaten/Kota, 2017 - 2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
(1)	(4)	(5)	(6)	(6)
Karimun	91,35	91,48	90,91	91,25
Bintan	92,58	92,79	93,10	93,12
Natuna	91,31	91,62	91,72	91,67
Lingga	89,73	89,29	89,26	89,25
Kepulauan Anambas	89,97	90,12	90,16	90,27
Batam	94,21	94,22	94,42	94,43
Tanjungpinang	96,46	96,47	96,77	96,79
Kepulauan Riau	92,96	92,97	93,10	93,31

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

3.4 Perkembangan Dimensi IPG Kota Tanjungpinang

IPG menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin. IPM adalah indeks komposit yang memadukan ukuran usia harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan suatu daerah dalam satu angka tunggal. Dengan kata lain, IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu





daerah yang dipresentasikan oleh tiga dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak.

3.4.1 Dimensi Kesehatan

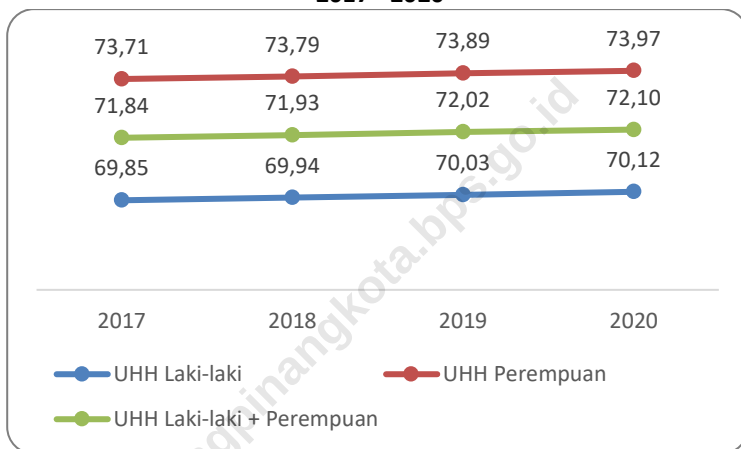
Pada aspek kesehatan, umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini sangat terkait dengan *female advantages* (FA), terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Berdasarkan pada Lemaire (2002), secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian, secara praktik di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Dalam pengukuran IPM, indeks kesehatan dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum yang bisa dicapai. Nilai maksimum umur harapan hidup (UHH) laki-laki adalah 82,5 tahun sedangkan bagi perempuan 87,5 tahun. Sedangkan untuk nilai minimum UHH laki-laki dan perempuan masing-masing adalah 17,5 dan 22,5 tahun. Angka tersebut mengikuti standar yang ditetapkan UNDP.

Berdasarkan pada Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 UHH laki-laki adalah 70,12 dan nilai untuk perempuan adalah sebesar 73,97. Sejak tahun 2017 nilai UHH perempuan dan laki-laki setiap tahunnya

mengalami peningkatan yang berarti bahwa tingkat kesejahteraan dan pembangunan perempuan dan laki-laki mengalami perbaikan.

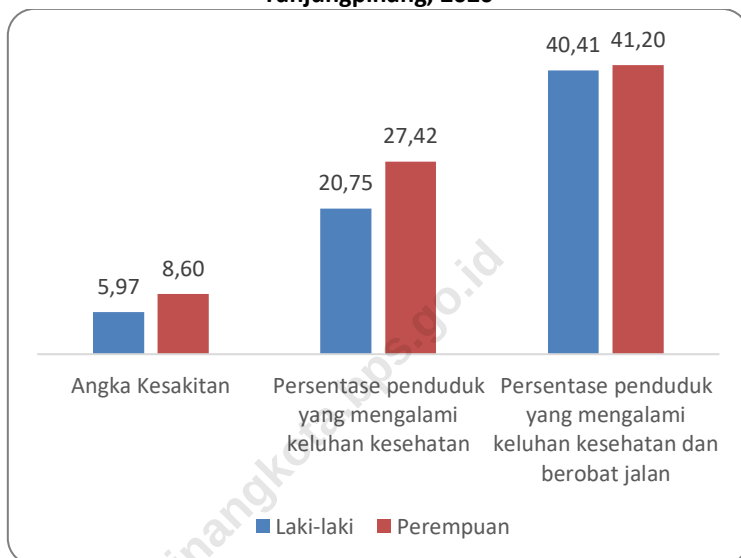
Gambar 3.13
Perkembangan UHH Perempuan, UHH Laki-laki
dan UHH Laki-laki + Perempuan Kota Tanjungpinang
2017 - 2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Meskipun UHH perempuan lebih besar dari laki-laki, namun dari aspek kesehatan yang lain seperti morbiditas dan keluhan kesehatan, perempuan masih di atas laki-laki, sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, tetapi perempuan lebih rentan dalam mengalami sakit. Hal ini terkait dengan karakter fisik perempuan yang secara umum lebih lemah dibandingkan laki-laki.

Gambar 3.14
Perkembangan Indikator Kesehatan Menurut Jenis Kelamin Kota
Tanjungpinang, 2020



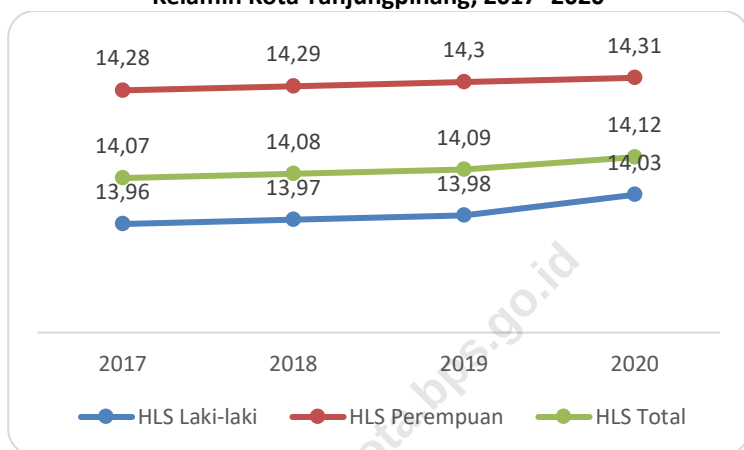
Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

3.4.2 Dimensi Pengetahuan

Salah satu statistik yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan suatu negara adalah harapan lama sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun keatas. HLS juga menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan. Pada tahun 2020 HLS perempuan adalah 14,31 tahun dan laki-laki sebesar 14,03 tahun. Dengan nilai pencapaian yang relatif hampir sama, mengindikasikan bahwa kesetaraan pembangunan dalam aspek pendidikan dapat diwujudkan secara merata dalam waktu yang tidak lama.

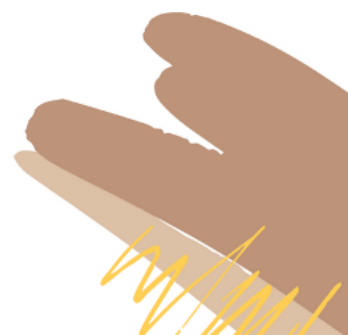


Gambar 3.15
Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang, 2017 -2020

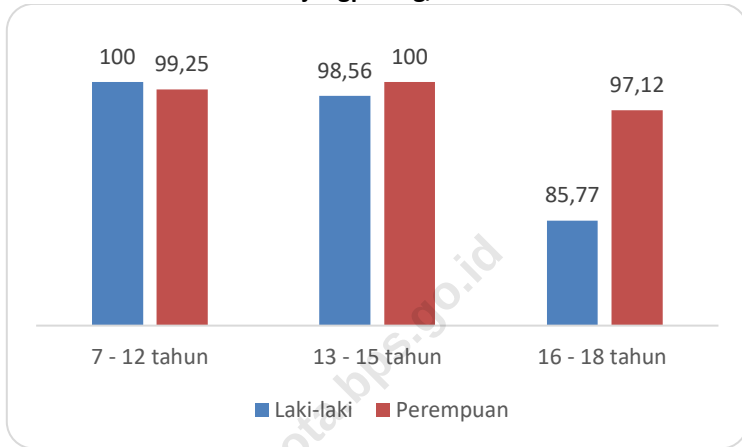


Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Selain menggunakan angka HLS, kualitas pendidikan suatu wilayah juga dapat diukur dengan angka partisipasi sekolah. Angka ini menggambarkan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jejang pendidikan tersebut. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Angka ini bermanfaat untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan serta keterjangkauan pendidikan dan pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15, dan 16-18 tahun).



Gambar 3.16
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kota
Tanjungpinang, 2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

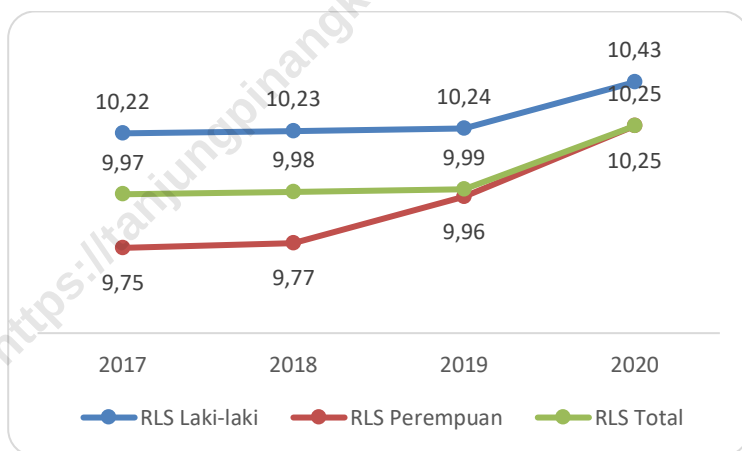
Berdasarkan data diatas, tahun 2020 Angka Partisipasi Sekolah (APS) sekolah umur 7 – 12 tahun pada perempuan (99,25 persen) lebih rendah dari APS laki-laki (100 persen). Sedangkan pada umur 13 – 15 tahun APS laki-laki (98,56 persen) lebih rendah dari APS perempuan (100 persen). Hal yang lebih menarik untuk dilihat adalah APS pada umur 16 – 18 tahun, APS laki-laki (85,77 persen) jauh lebih rendah dari APS perempuan (97,12 persen). Rendahnya APS pada umur tersebut terkait dengan kebiasaan di masyarakat yang mendorong anak laki-laki untuk berkerja di usia muda demi membantu perekonomian orang tuanya.

Salah satu ukuran capaian pada bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah, berbeda dengan harapan lama sekolah yang memperlihatkan capaian jangka pendek, rata-rata lama sekolah menggambarkan capaian pendidikan jangka panjang. Rata-rata lama

sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk laki-laki dan perempuan usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Selama tahun 2017 – 2020 selisih antara RLS laki-laki dan perempuan semakin kecil. Rata-rata pendidikan laki-laki sekitar 1 tahun lebih lama dibandingkan perempuan pada tahun 2017 - 2019. Pada tahun 2020, rata-rata pendidikan yang dijalani oleh laki-laki adalah sekitar 10,43 tahun, sedangkan perempuan 10,25 tahun.

Gambar 3.17
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Jenis Kelamin Kota Tanjungpinang, 2017 -2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

3.4.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian.



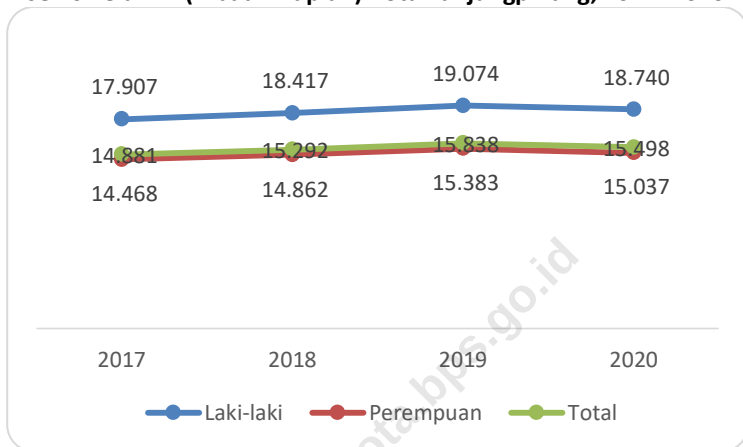
Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukkan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

Selama periode 2017 hingga 2020, nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (Gambar 3.18). Pada tahun 2020 pengeluaran perkapita yang disesuaikan perempuan adalah sebesar 15,04 juta rupiah, sedangkan pengeluaran perkapita yang disesuaikan laki-laki adalah sebesar 18,74 juta rupiah. Rendahnya capaian perempuan dalam ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan perempuan dalam memasuki pasar tenaga kerja di lapangan usaha tertentu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja laki-laki, seperti pada pertambangan dan penggalan, listrik, gas dan air serta angkutan, perdagangan dan komunikasi. Lapangan usaha yang masih didominasi oleh laki-laki tersebut memiliki tingkat produktivitas yang relative tinggi dibanding lapangan usaha lainnya.



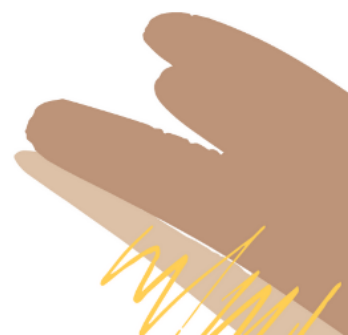


Gambar 3.18
Perkembangan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Menurut Jenis Kelamin (Ribuan Rupiah) Kota Tanjungpinang, 2017 -2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

<https://tanjungpinangkota.bps.go.id>

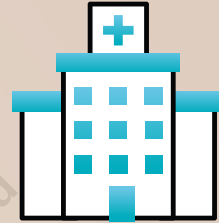


BAB 4

UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER



Rasio dokter terhadap penduduk Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah 15:10.000.



Fasilitas kesehatan di Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah 3 RS, 7 Puskesmas dan 47 Klinik Kesehatan



Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2020

APS SD : 99,62 %
APS SMP : 99,20 %
APS SMA : 91,51 %



PDRB ADHB tahun 2020 sebesar 19.665,01 Milyar Rupiah. Sektor perdagangan dan konstruksi merupakan sektor dengan kontribusi terbesar

BAB IV

UPAYA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN GENDER

Memantau Indikator Pendukung pada Dimensi Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, yang pada gilirannya memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif. Peningkatan derajat kesehatan tercermin dalam IPM melalui komponen Umur Harapan Hidup yang semakin meningkat. Sementara itu, upaya pencapaian derajat kesehatan juga dapat tercermin dari ketersediaan sarana dan parasarana kesehatan, persentase penolong persalinan oleh tenaga medis, serta sarana-sarana lainnya.

Tenaga Medis dan Sarana Kesehatan

Penyediaan tenaga medis merupakan salah satu input penting dalam pembangunan kesehatan. Tenaga medis memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka menciptakan masyarakat yang sehat. Penyediaan tenaga medis meliputi ketersediaan jumlah dokter, bidan, dan tenaga medis lain. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat pula dengan menyediakan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang

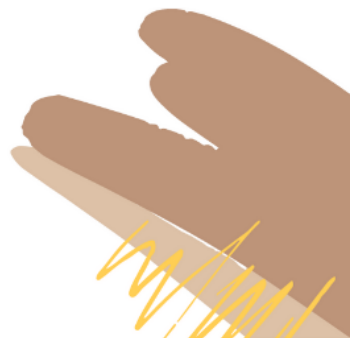


mudah diakses akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya di bidang kesehatan.

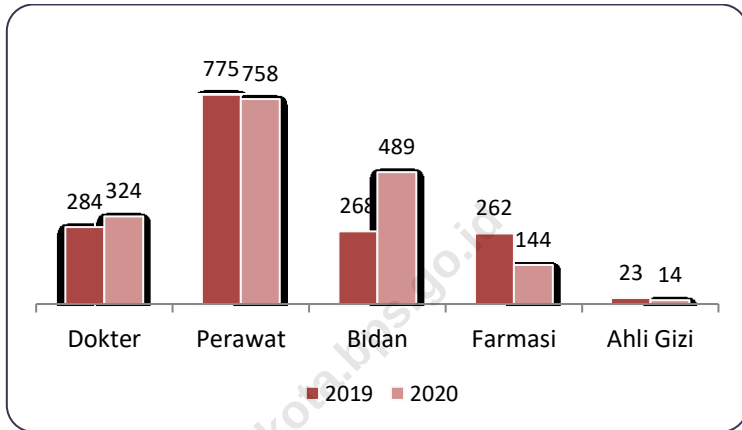
Selama periode 2019-2020, jumlah tenaga kesehatan di kota Tanjungpinang yang paling banyak adalah perawat, mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 758 orang. Pada tahun 2020, jumlah dokter mengalami peningkatan sebanyak 40 dokter. Jika dilihat dari rasio dokter terhadap penduduk, sudah tersedia 15 orang dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Angka tersebut sudah melampaui standar ideal rasio dokter terhadap penduduk oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Adapun standar ideal menurut WHO adalah 1:2.500.

Sementara itu, jumlah sarana kesehatan yang tersedia juga sudah cukup memadai. Terdapat 3 (tiga) rumah sakit dimana 2 (dua) diantaranya adalah rumah sakit pemerintah. Puskesmas, Klinik/ Balai Kesehatan, dan Posyandu juga telah tersebar di seluruh kecamatan yang ada.

Oleh karena itu, tenaga medis dan sarana kesehatan yang tersedia diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses kesehatan demi mencapai derajat kesehatan yang lebih baik.

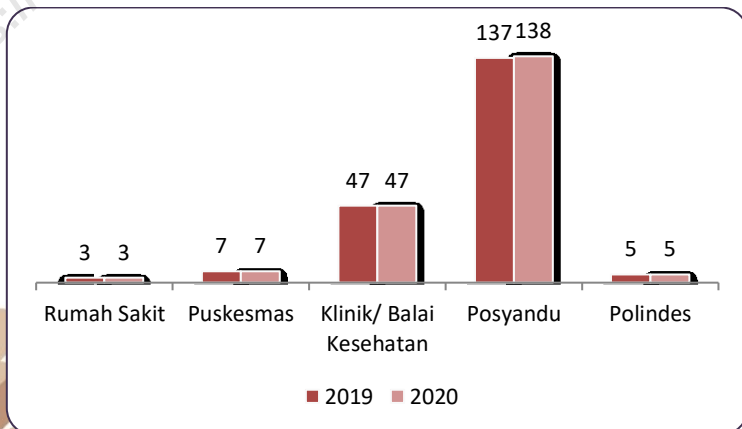


Gambar 4.1
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Tanjungpinang
2019-2020



Sumber: Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2021

Gambar 4.2
Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Tanjungpinang
2019-2020

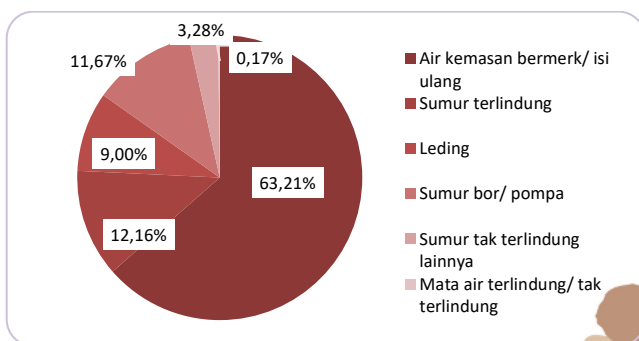


Sumber: Kota Tanjungpinang Dalam Angka 2021

Sanitasi Rumah Tinggal

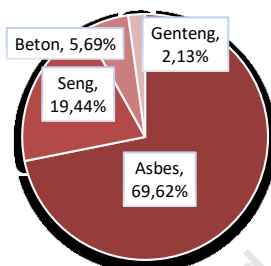
Usaha untuk menciptakan keadaan yang baik di bidang kesehatan pada tempat tinggal merupakan salah satu hal yang dapat memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat. Usaha tersebut dapat berupa tersedianya fasilitas tempat tinggal seperti sumber air minum layak, kepemilikan jamban sendiri, serta jenis atap, lantai dan dinding yang layak. Berdasarkan data Susenas Maret 2020, sebanyak 63,21 persen rumah tangga sudah menggunakan air kemasan bermerk/ air isi ulang sebagai sumber air minum utama, namun masih terdapat 3,45 persen rumah tangga menggunakan sumur/ mata air tak terlindung. Jika dilihat dari kepemilikan jamban, sebanyak 96,39 persen rumah tangga sudah memiliki fasilitas buang air besar sendiri. Sementara itu, berdasarkan jenis lantai tempat tinggal, tidak ada lagi penduduk Tanjungpinang yang menempati rumah tinggal berlantai tanah. Begitu pula jenis atap dan dinding, tercatat lebih dari separuh rumah tangga sudah menempati rumah tinggal dengan atap dan dinding yang layak.

Gambar 4.3
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Utama, 2020



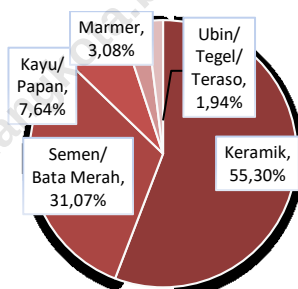
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Gambar 4.4
Persentase Rumah Tangga Menurut Atap Rumah Terluas, 2020



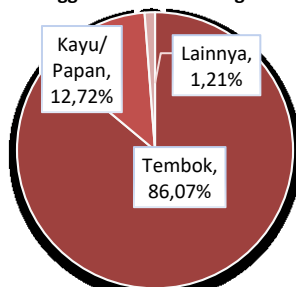
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Gambar 4.5
Persentase Rumah Tangga Menurut Lantai Rumah Terluas, 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

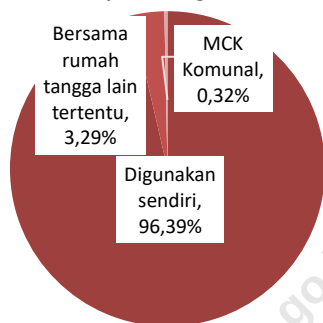
Gambar 4.6
Persentase Rumah Tangga Menurut Dinding Rumah Terluas, 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020



Gambar 4.7
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan
Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2020

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tentunya merupakan tanggungjawab semua pihak. Ketersediaan sarana kesehatan perlu didukung dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami pentingnya menciptakan dan menjaga lingkungan disekitarnya agar tetap sehat, serta melaksanakan perilaku hidup sehat.

Memantau Indikator Pendukung pada Dimensi Pendidikan

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan aset kekayaan bangsa sekaligus sebagai modal dasar pembangunan. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama yang harus dimiliki manusia agar mampu meningkatkan potensinya dan

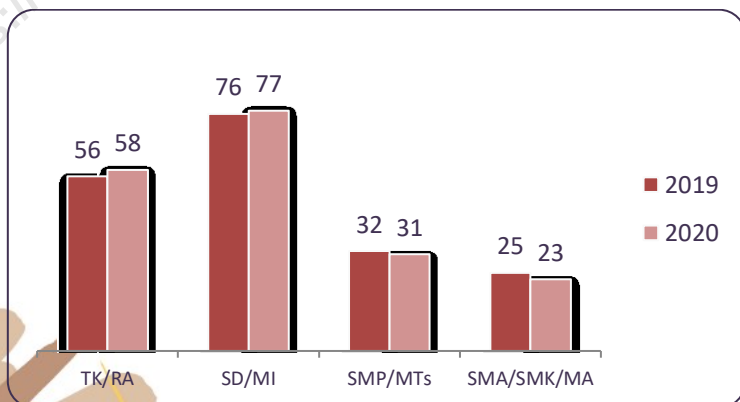


berkontribusi dalam pembangunan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki suatu bangsa, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan potensi bangsa itu. Pembangunan manusia yang masih terus berlangsung hingga saat ini di Indonesia mencatat perkembangan yang menggembirakan. Akan tetapi, monitoring terhadap kinerja pembangunan di bidang pendidikan harus tetap dilakukan untuk memastikan kebijakan dan langkah ke depan.

Tenaga Pendidik dan Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan menjadi kunci penting keberlangsungan proses belajar mengajar. Sekolah yang ada harus mudah diakses dan ideal dengan jumlah anak usia sekolah. Selain itu, rasio guru dan murid juga harus ideal sehingga proses belajar dapat berjalan optimal.

Gambar 4.8
Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2019-2020

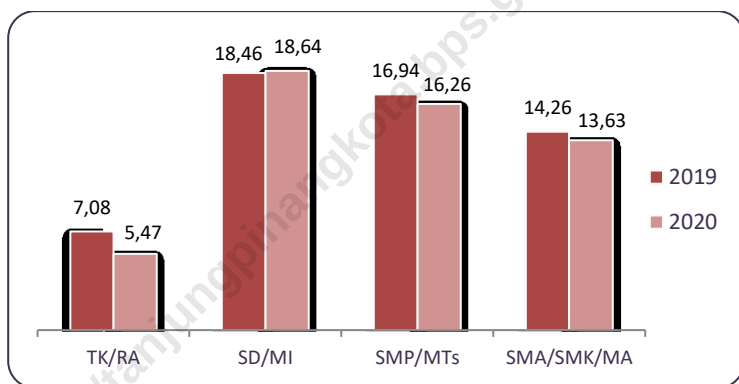


Sumber: Kota Tanjungpinang dalam Angka 2021



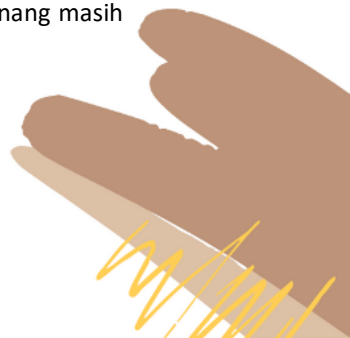
Pada tahun 2020, terdapat 77 SD/ MI negeri dan swasta dan 31 SMP/ MTs negeri dan swasta yang tersebar di seluruh kecamatan. Dari total 189 sekolah sesuai pada Gambar 4.8, terdapat 49.021 murid dengan persentase terbanyak berada pada jenjang pendidikan SD/ MI (48,01 persen).

Gambar 4.9
Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan,
2019-2020



Sumber: Kota Tanjungpinang dalam Angka 2021

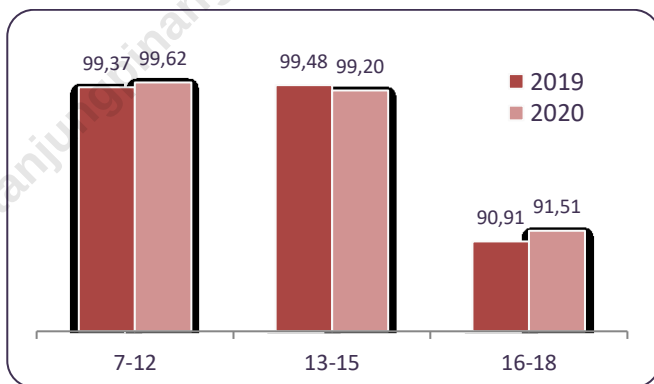
Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, rasio murid-guru yang ideal di Indonesia adalah 29:1 untuk jenjang pendidikan SD, 24:1 untuk jenjang pendidikan SMP, dan 20:1 untuk jenjang pendidikan SMA. Berdasarkan Gambar 4.9, data tahun 2020 menunjukkan bahwa rasio murid-guru di kota Tanjungpinang masih ideal untuk kelangsungan kegiatan belajar mengajar.



Partisipasi Sekolah

Indikator *output/ outcome* di bidang pendidikan yang berkaitan langsung dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di antaranya adalah angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni. Kedua indikator ini berhubungan erat dengan harapan lama sekolah dalam jangka pendek. Sementara itu berhubungan dalam jangka panjang dengan rata-rata lama sekolah. Oleh karena itu, indikator tersebut secara bersama-sama harus dimonitor untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Gambar 4.10
Angka Partisipasi Sekolah (persen) Menurut Kelompok Umur, 2019-2020



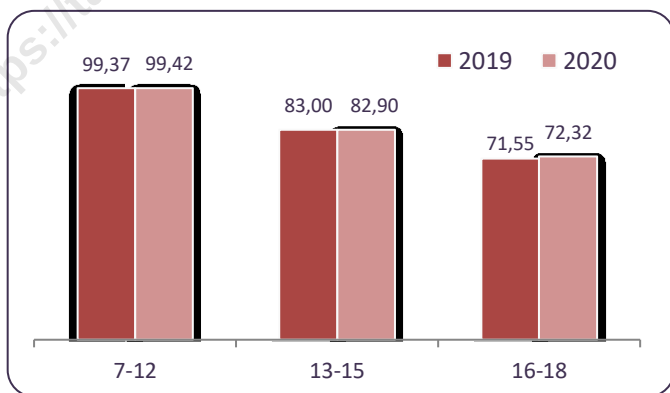
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2019 dan 2020

Angka Partisipasi Sekolah Kota Tanjungpinang sudah lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Kepulauan Riau di setiap kelompok umur. Penduduk yang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) pada seluruh

kelompok umur mengalami peningkatan di tahun 2020. Penduduk 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah paling tinggi.

Untuk melihat proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian, digunakan Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu. Pada Gambar 4.12 terlihat bahwa APM usia 13-15 tahun atau SMP/ Sederajat dan usia 16-18 tahun atau SMA/ Sederajat lebih rendah dibandingkan APS kelompok umur yang bersesuaian. Hal yang perlu digarisbawahi adalah perlu upaya untuk memastikan partisipasi penduduk untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Gambar 4.12
Angka Partisipasi Murni (persen) Menurut Kelompok Umur,
2019-2020



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2019 dan 2020



Memantau Indikator Pendukung pada Dimensi Standar Hidup Layak

Indikator ekonomi yang mencerminkan tingkat kesejahteraan/ hidup layak dalam penghitungan IPM adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Namun, terdapat beberapa indikator lain berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT), upah tenaga kerja, PDRB per kapita, gini rasio, kemiskinan, dan lain-lain.

Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sementara itu, untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk digunakan *gini ratio* yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Berdasarkan Tabel 4.1, ada sebanyak 19,98 ribu penduduk berada di bawah garis kemiskinan di tahun 2020. Angka tersebut setara dengan 9,37 persen penduduk Kota Tanjungpinang. Jumlah penduduk miskin tersebut mengalami peningkatan dibandingkan



tahun sebelumnya yang sebesar 19,05 ribu jiwa. Sisi lain yang perlu diperhatikan dari angka kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Meningkatnya persentase penduduk miskin menyebabkan naiknya tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Begitu juga dengan angka gini rasio yang menunjukkan kesenjangan yang melebar dari 0,31 pada tahun 2019 menjadi 0,35 pada tahun 2020.

Tabel 4.1.
Indikator Kemiskinan Kota Tanjungpinang,
2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	19,05	19,98
Persentase Penduduk Miskin	9,03	9,37
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P0)	1,15	1,58
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P1)	0,23	0,40
Gini Rasio	0,31	0,35

Sumber: Kota Tanjungpinang dalam Angka 2021

Ketenagakerjaan

Pada tahun 2020, terdapat 102.533 orang termasuk dalam angkatan kerja, yang terdiri dari 92.996 orang penduduk bekerja dan 9.537 orang pengangguran. Meningkatnya jumlah pengangguran, mengakibatkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

di tahun 2020 juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari 6,31 persen tahun 2019 menjadi 9,30 persen tahun 2020.

Tabel 4.2
Indikator Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang,
2019-2020

Indikator	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Angkatan Kerja	100 705	102 533
- Bekerja	94 349	92 996
- Pengangguran	6 356	9 537
Bukan Angkatan Kerja	60 524	61 374
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	62,46	62,56
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,31	9,30

Sumber: Kota Tanjungpinang dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel 4,3, di antara penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu, penduduk yang bekerja tersebut mayoritas bekerja pada sektor jasa-jasa (Kategori 3) baik laki-laki maupun perempuan. Sementara itu jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki yang bekerja masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan atau sekitar 62 persen pada tahun 2020. Kategori lapangan pekerjaan Pertanian Kehutanan dan Perikanan merupakan lapangan pekerjaan yang paling sedikit digeluti oleh penduduk yang bekerja atau hanya sekitar 4,45 persen pada tahun 2020.



Tabel 4.3
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama
Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan
Jenis Kelamin di Kota Tanjungpinang, 2019-2020

Lapangan Pekerjaan Utama*	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2 667	3 596	311	539	2 978	4 135
2	11 892	10 001	3 293	5790	15 185	15 791
3	44 113	44 060	32 073	29010	76 186	73 070
Jumlah	58 672	57 657	35 677	35 339	94 349	92 996

Sumber: Kota Tanjungpinang dalam Angka, 2020-2021

* 1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; Konstruksi

3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya

Produk Domestik Regional Bruto

Komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan secara signifikan mempengaruhi perkembangan angka IPM. Daya beli tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara makro. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana gambaran perekonomian makro yang ada sebagai indikator yang dapat menentukan kebijakan yang akan diambil terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 4.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Kota Tanjungpinang (Miliar Rupiah),
2019-2020

Lapangan Usaha	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	140,30	138,23
2. Pertambangan & Penggalan	3,66	3,29
3. Industri Pengolahan	1 283,52	1 304,99
4. Pengadaan Listrik & Gas	39,32	39,22
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	13,72	13,49
6. Konstruksi	5 799,61	5 657,15
7. Perdagangan	5 752,40	5 702,93
8. Transportasi	1 214,89	837,97
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	317,48	214,00
10. Informasi, Komunikasi	567,76	623,25
11. Jasa Keuangan	671,64	661,73
12. Real Estate	624,50	634,16
13. Jasa Perusahaan	3,08	2,56
14. Administrasi Pemerintahan	2 110,74	2 223,44
15. Jasa Pendidikan	872,60	908,54
16. Jasa Kesehatan	493,47	491,95
17. Jasa Lainnya	259,30	208,01
Produk Domestik Regional Bruto	20 167,98	19 665,01

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang
 Keterangan : * Angka Sementara
 ** Angka Sangat Sementara



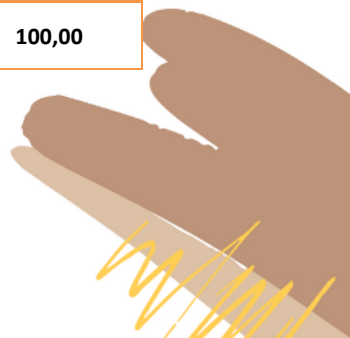
Tabel 4.4
Peranan Sektor Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku di Kota Tanjungpinang (persen),
2019-2020

Lapangan Usaha	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,70	0,70
2. Pertambangan & Penggalian	0,02	0,02
3. Industri Pengolahan	6,36	6,64
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,19	0,20
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07
6. Konstruksi	28,76	28,77
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28,52	29,00
8. Transportasi dan Pergudangan	6,02	4,26
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,57	1,09
10. Informasi dan Komunikasi	2,82	3,17
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,36
12. Real Estat	3,10	3,22
13. Jasa Perusahaan	0,02	0,01
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,47	11,31
15. Jasa Pendidikan	4,33	4,62
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,45	2,50
17. Jasa Lainnya	1,29	1,06
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara





Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tanjungpinang pada tahun 2020 mencapai 19,66 triliun rupiah. Angka tersebut menempatkan Kota Tanjungpinang di urutan ke tiga dengan PDRB terbesar di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Jika dilihat berdasarkan struktur ekonomi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi terbesar dalam perekonomian Kota Tanjungpinang selama 2020 yaitu sebesar 29,00 persen. Perkembangan sektor konstruksi dan sektor lainnya telah mendorong tumbuhnya sektor utama ini.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pembangunan di samping pemerataan. Pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan pertanda keberhasilan pembangunan yang harus selalu dipertahankan dan dijaga dengan kebijakan-kebijakan yang memacu pertumbuhan atau meminimalisir kendala pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi harus selalu diusahakan melampaui laju pertumbuhan penduduk sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.



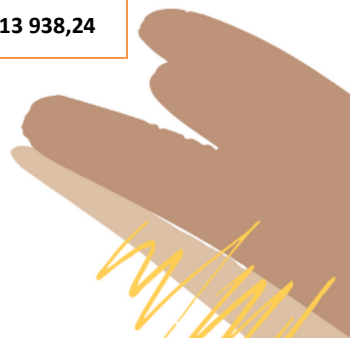
Tabel 4.5
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha
Kota Tanjungpinang (Miliar Rupiah),
2019-2020

Lapangan Usaha	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	111,55	108,10
2. Pertambangan & Penggalian	1,20	1,10
3. Industri Pengolahan	958,27	961,66
4. Pengadaan Listrik & Gas	37,03	36,94
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,50	10,32
6. Konstruksi	4 522,76	4 397,47
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3 623,20	3 517,63
8. Transportasi dan Pergudangan	907,55	635,53
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	218,93	151,02
10. Informasi dan Komunikasi	514,57	566,20
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	492,02	485,80
12. Real Estat	485,69	490,55
13. Jasa Perusahaan	2,36	2,03
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 387,66	1 454,33
15. Jasa Pendidikan	608,79	604,08
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	376,95	373,45
17. Jasa Lainnya	177,91	142,01
Produk Domestik Regional Bruto	14 436,94	13 938,24

Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Keterangan : * Angka Sementara

 ** Angka Sangat Sementara



Tabel 4.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kota Tanjungpinang (persen), 2019-2020

Lapangan Usaha	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,09	-3,09
2. Pertambangan & Penggalian	10,15	-8,39
3. Industri Pengolahan	0,43	0,35
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,45	-0,25
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,63	-1,69
6. Konstruksi	0,42	-2,77
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,08	-2,91
8. Transportasi dan Pergudangan	0,96	-29,97
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	6,85	-31,02
10. Informasi dan Komunikasi	3,48	10,03
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,76	-1,26
12. Real Estat	1,30	1,00
13. Jasa Perusahaan	1,57	-14,06
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,78	4,80
15. Jasa Pendidikan	6,75	-0,77
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,71	-0,93
17. Jasa Lainnya	3,79	-20,18
Produk Domestik Regional Bruto	3,27	-3,45

Sumber : BPS Kota Tanjungpinang

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

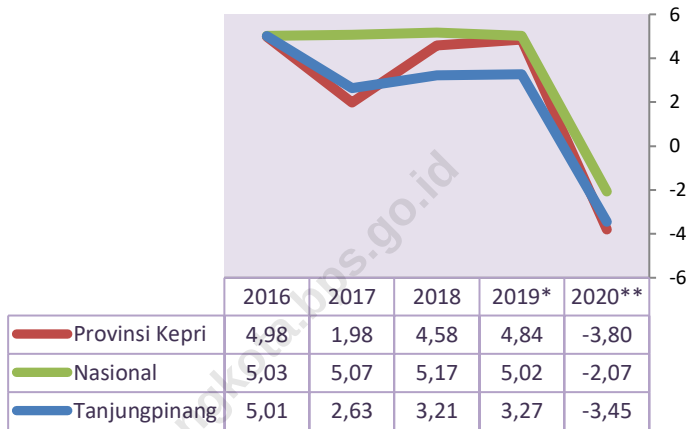


Pada tahun 2020, perekonomian Kota Tanjungpinang mengalami kontraksi 3,45 persen dibanding tahun sebelumnya. Hampir semua lapangan usaha terkontraksi kecuali Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Real Estat, serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Terkontraksinya perekonomian pada tahun 2020 utamanya disebabkan oleh pandemi COVID19 yang secara signifikan mengurangi aktivitas lapangan usaha seperti jasa-jasa. Untuk mengatasinya, pemerintah telah berupaya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Langkah kebijakan diarahkan pada perbaikan sisi permintaan dengan cara menjaga konsumsi, mendorong investasi, serta mendukung ekspor impor. Dengan adanya stimulus tersebut diharapkan dapat memacu pertumbuhan output dan nilai tambah setiap kategori lapangan usaha terutama yang terdampak signifikan.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 adalah sebesar 13,94 triliun rupiah, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 14,44 triliun rupiah bahkan lebih rendah dibanding 2018. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 adalah kategori Informasi dan Komunikasi yaitu tumbuh sebesar 10,03 persen. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan komunikasi jarak jauh seperti telepon dan internet dalam rangka pencegahan COVID19. Sementara itu, kategori yang mengalami kontraksi cukup dalam adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Transportasi dan Pergudangan.



Gambar 4.14
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau, dan Nasional (persen),
2016-2020



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang

Keterangan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional dalam periode 2016-2020, terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang secara rata-rata lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 5,01 persen, lebih tinggi dari angka Provinsi, dan terendah pada tahun 2020 sebesar -3,45 persen dimana pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional juga berkontraksi.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TANJUNGPINANG**

Jl. WR. Supratman Km. X No. 1 Tanjungpinang 29125
Telp : (0771) 444204
E-mail : bps2172@bps.go.id
Homepage : <http://tanjungpinangkota.bps.go.id>

ISBN 978-602-353-065-6



9

786023

530656